

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Jateng Pos
Media Online

Wilayah: Kabupaten Sragen

Halaman 12 dan 15

Dana Sragen Mengendap Rp 376 Miliar

SRAGEN-Dana sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) APBD Sragen 2019 senilai Rp 376.284.000 masih mengendap. Hal itu terungkap dalam penjelasan LKPJ yang disampaikan Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati dalam paripurna DPRD Sragen, Senin (9/3).

Sekda Sragen Tatag Prabawanto menjelaskan, Silpa tersebut merupakan hasil efisiensi anggaran dan juga untuk belanja pegawai yang belum dicairkan. Sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) APBD Sragen 2019 mencapai Rp 376,2 miliar lebih. Jumlah Silpa 2019 itu terungkap dalam rapat paripurna agenda Penjelasan

Bupati Sragen terhadap LKPJ Bupati Sragen akhir tahun anggaran 2019 di gedung DPRD.

Dalam kesempatan itu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan jumlah Silpa tersebut terdiri dari beberapa pos anggaran. Di antaranya Rp 310,43 miliar dari Kasda, kemudian kas RSUD dr Soehadi Prijonegoro Rp 53,6 miliar, Deposito RSUD dr Soehadi Prijonegoro Rp 3 miliar, RSUD Gemolong 3,5 miliar. Kemudian berada kas 25 Puskemas sejumlah Rp 3,6 miliar dan berada di Kas bantuan operasional sekolah senilai Rp 2 miliar.

Sekretaris Daerah Pemkab Sragen Tatag Prabawanto se usai rapat paripurna menjelaskan, Silpa paling banyak karena belanja tidak langsung. Di antaranya gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang belum bisa terbayarkan pada 2019. Selain itu efisiensi sejumlah pekerjaan, yang kontraknya dibawah dari nilai anggaran.

Sementara Sekda menyampaikan tidak ada Silpa dari proyek yang belum dikerjakan baik dari DAK maupun DAU. Sedangkan disinggung Silpa untuk

RSUD dr Soehadi Prijonegoro menurut Tatag masuk BLUD untuk pembangunan yang rencananya dilanjutkan tahun ini.

"Silpa itu dari gaji P3K Rp 23 miliar, gaji persiapan untuk pengadaan PNS. Dari RSUD itu di BLUD untuk proyek pembangunan. Semoga bisa dikerjakan tahun ini," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Muslim menilai Silpa tersebut tidak terlalu besar, karena sebagian besar adalah belanja tidak langsung atau untuk honor dan gaji pegawai. Namun Muslim me-

nyebutkan hal ini menunjukkan kurangnya kecermatan dalam merencanakan anggaran.

"Yang kita cermati bagaimana Silpa itu menjadi kecil, tentunya dengan perencanaan yang lebih baik. Sebenarnya tidak terlalu besar juga sih, kemarin daerah mana itu ada yang sampai 1 triliun," bebarnya.

Pihaknya berharap tahun tahun mendatang eksekutif tentunya lebih cermat dalam membuat perencanaan anggaran. Paling tidak dapat menekan angka Silpa tahun ini.(ars/rit)